

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yaitu ketidak efektifan, *inefisiensi* dan *private iurement* (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggung jawaban yang baku dalam organisasi. Organisasi pemerintah tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang sering kali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memiliki barometer keberhasilan seperti pada perusahaan/organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerintah daerah.

Untuk menentukan keberhasilan dari pemerintah daerah dibutuhkan kinerja pegawai yang sangat diharapkan oleh manajemen dalam mengelola pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus dapat mengelola suatu organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan.

Oleh karena itu untuk mengawasi kegiatan dalam RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory*, dimana pemerintah sebagai *agent* dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai *principal*. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Pada organisasi pemerintah dikenal dengan sebutan “ Sistem Pengawas Internal (SPI)”.

Menurut Wirda, Darwanis dan Usman (2012: 9) Sistem Pengawas Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebelum melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten disusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan dengan berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam

penggunaan sumber daya pengawasan. Sebagai bentuk konkrit pelaksanaan pengawasan yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan pemeriksaan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan.

Dalam laporan hasil pengawasan, satu diantara tugas internal control adalah menilai dan menganalisis serta ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi pemerintahan daerah dengan memperkenalkan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektifitas dan kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi kinerja yang merupakan kunci sukses bagi manajemen dalam mencapai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik.

Menurut Murad Baso dalam Saragih (2004 :34) Internal Control pada Pemerintah Daerah adalah memeriksa RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan kunci sukses bagi manajemen dalam mencapai kinerja institusi yang baik. Kinerja merupakan hasil kerja bersama dari orang, sumber daya dan lingkungan berdasarkan tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Pilipus (2009 : 12-13) bahwa di Indonesia, pembentukan fungsi internal control merupakan keharusan bagi suatu organisasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 jo Nomor 3 tahun 1983, telah mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan pertanggung jawaban serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, namun proses implementasi masih pada tahap sosialisasi dan penyiapan pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep sistem internal control yang dikeluarkan oleh *Committee Of Sponsoring Organization* dari Tredway Commissions (COSO). Sistem Internal

Control terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Internal Control yang dikeluarkan COSO terdiri dari lima komponen, yaitu lingkungan pengawasan, penilaian resiko, aktivitas pengawasan dan infokom (informasi dan komunikasi) serta pemantauan. Pelaksanaan sistem internal control seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengawasan yang sudah dibangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan penetapan prosedur dan review pada seluruh tahapan pembangunan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem Internal Control yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kinerja sebagai hasil/prestasi manajemen dalam menjalankan aktivitas institusi pemerintahan harus diukur untuk menentukan atau mengetahui tingkat keberhasilan manajemen, sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan manajemen menjalankan institusi pemerintahan. Saragih (2004: 35) menyatakan penilain kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu institusi, bagian dari institusi dan pegawai berdasarkan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Andrias Bangun (2009 : 36) menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan kinerja daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan
2. Urusan pemerintah, penjagaan administrasi umum pemerintah dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan daerah
 - b. Kelembagaan
 - c. Pegawai daerah
 - d. Keuangan daerah, dan
 - e. Barang daerah.

Kabupaten Deli Serdang adalah satu diantara wilayah terluas di Sumatera Utara dan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi yang merupakan komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta harkat dan martabat masyarakat. Luasnya wilayah Deli Serdang harus di kontrol oleh pemerintahan kabupaten dan dibutuhkan kinerja yang ekstra untuk dapat mensejahterakan pemerintahan dan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tahun 2011 dari Medan Bisnis edisi Jum'at 29/6/2011 bahwa kinerja Pemkab Deli Serdang Disclaimer (Tidak member pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) dan sudah empat tahun berturut-turut dipertanyakan karena kinerja hampir di semua lini dinilai menurun drastis, penanganan tidak seimbang dengan banyaknya persoalan di tengah masyarakat. Di antaranya penanganan perizinan, penertiban, pertanahan,

PAD dan infrastruktur jalan yang makin memprihatinkan. Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga saat ini masih kekurangan tenaga yang memiliki skill dan keterampilan sesuai dengan tupoksinya, sehingga tenaga yang ada sekarang ini terpaksa menangani tugas ganda. Sehingga tidak jarang terbengkalai alias lamban. Mirisnya lagi tugas yang ditangani staf tersebut tidak sesuai dengan SDM-nya. *"The right man on the right place"* masih langka di tubuh Pemkab Deli Serdang.

Menyikapi kondisi riil yang terjadi saat ini, dewan menyarankan agar Bupati Deli Serdang, segera mengisi jabatan eselon IV hingga Eselon II masih lowong dengan orang yang betul-betul memiliki SDM sesuai dengan tupoksinya. Kemudian diperlukan peninjauan kembali terhadap pejabat yang kinerjanya kurang efektif.

Dengan demikian, pemerintah yang baik (*good governance*) bagi upaya mewujudkan harapan masa depan yang gemilang sejalan dengan visi-misi pembangunan Deli serdang yang maju bersama masyarakatnya, yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinnekaan dapat terwujud.

Penelitian dengan topik yang hampir sama dengan penelitian Pilipus Ramandei (2009) tentang Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kota Jayapura.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah konsentrasi pada internal control terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan evaluasi menjadi bahan penilaian terhadap sistem internal control sehingga semakin meningkat pula kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Deli Serdang.

Dari hal tersebut di atas mendorong dan memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang perlu didukung dengan internal control. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan topik *Pengaruh Internal Control Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di indikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan penurunan kinerja Kabupaten Deli Serdang seperti dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tahun 2011 bahwa kinerja Pemkab Deli Serdang Disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) dan sudah empat tahun berturut-turut dipertanyakan karena kinerja hampir di semua lini dinilai menurun drastis ?
2. Apakah internal control dapat mempengaruhi kinerja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang ?

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Internal Control yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya yang semuanya terangkum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dimana internal control sebagai variabel Independen (X)
2. Kinerja disamakan dengan hasil kerja dari seorang pegawai. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia, oleh karena itu penilaian kerja SDM sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel Dependent (Y).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut : Apakah Internal Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris yaitu : Untuk menganalisis pengaruh Internal Control terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat berguna untuk :

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengawasan interal atau *internal control* yang berlaku dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta meningkatkan kemampuan analisis tentang pengawasan dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Bagi Institusi daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Deli Serdang diharapkan sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya untuk meningkatkan citra dan peran Internal Control
- c. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama.